**EFEKTIVITAS E-WARONG PKH BERKAH HARPAN KECAMATAN MARPOYAN DAMAI DALAM PENYALURAN BANTUAN PANGAN NON TUNAI (BPNT)**

Abdiana Ilosa 1, Saipul Alsukri 2, Nurrahmi Hayani 3, Darni 4, Zulhaida5

Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim

[abdiana@uin-suska.ac.id](mailto:abdiana@uin-suska.ac.id)

**ABSTRAK**

*Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) merupakan bantuan pangan sebagai bentuk upaya dari pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan dan pangan dan memberikan perlindungan bagi keluarga miskin melalui pendistribusian pangan yang diharapkan mampu menjangkau keluarga miskin, masing - masing keluarga menerima bantuan Rp. 110.000Kemudian dana ini disalurkan melalui Elektronik Warung Gotong Royong Kelompok Usaha Besama. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana efektifitas e -warong pkh berkah harpan kecamatan marpoyan damai dalam penyaluran bantuan pangan non tunai (bpnt) dan hambatan dalam penyatluran BPNT. Peneltian ini Kualitatif dengan metode deskriptif dengan informan penelitian memakai metode key informan. indicator yang digunakan oleh penulis adalah Ketepatan sasaran program, Sosialisasi program, Tujuan program dan Pemantauan program. Hasil penelitian menyatakan penyaluran BNPT melalui e-Warong belum efektif karena Keluarga Penerima manfaat (KPM) blum tepat sasaran, kemudian masih kurangnya sosialisasi baik itu kepada petugas e-Warong dan juga KPM, malalah tujuan program sudah bagus tetapi karena prosesnya yang kurang efektif mengakibatkan tujuan dari program BNPT kurang terlaksana tetapi dibalik ini semua masalah pengawasan sudah berjalan dengan baik dan rutin dilaksanakan. Untuk hambatan terdapat pada data yang tdak singkron antara pusat dan daerah kemudian karena kurangnya sosialisasi jadi mempersuit proses penyaluran.*

**Key informan : efektfitas,Kebijakan publik, e-warong, BPNT**

**LATAR BELAKANG**

Salah satu kebijakan yang dikeluarkan pemerintah untuk menanggulangi kemiskinan adalah Program Keluarga Harapan yang selanjutnya ditulis dengan PKH. Menurut Kementerian Sosial RI Program Keluarga Harapan adalah program pemberian bantuan sosial bersyarat kepada keluarga dan/atau seseorang miskin dan rentan yang terdaftar dalam data terpadu program penanganan fakir miskin, diolah oleh Pusat Data dan Informasi Kesejahteraan Sosial dan ditetapkan sebagai Keluarga Penerima Manfaat PKH. Didalam Permensos RI No 1 tahun 2018 tentang Program Keluarga Harapan bahwa Keluarga Penerima Manfaat (KPM) adalah keluarga penerima bantuan sosial PKH yang telah memenuhi syarat dan ditetapkan dalam keputusan. Bantuan Sosial PKH adalah bantuan berupa uang kepada keluarga dan/atau seseorang miskin, tidak mampu dan/atau rentan terhadap resiko sosial.

Selanjutnya pemerintah menciptakan inovasi pelayanan Publik dengan mengeluarkan Peraturan menteri Sosial Republik Indonesia No 25 Tahun 2016 Tentang Bantuan Pengembangan Sarana Usaha Melalui Elektronik Warung Gotong Royong Kelompok Usaha Bersama yang selanjutnya ditulis dengan E-Warong KUBE. Program ini merupakan pengalihan bantuan sosial tunai ke bantuan sosial nontunai berbasis digital. Tujuan program ini adalah, antara lain, meningkatkan efektivitas bantuan sosial dan memperluas cakupan pelayanan keuangan inklusif. Kemudian lebih lanjur Permensos RI No 25 Tahun 2016 tentang E-Warong KUBE PKH ini menjelaskan tentang kegiatan-kegiatan dalam E-Warong KUBE PKH yaitu: a).Melayani pencairan Bantuan Sosial non tunai; b) Melayani penjualan bahan pangan pokok murah bagi penerima Bantuan Sosial; c). Melayani pembayaran telepon, listrik, dan air bagi penerima Bantuan Sosial dan masyarakat umum; d).Memasarkan hasil produksi KUBE; e). Menjadi agen bank yang bekerja sama dalam penyaluran Bantuan Sosial nontunai; dan f).Melakukan usaha pengemasan ulang bahan pangan pokok dari bentuk curah menjadi kemasan tertentu.

E- Warong Kube merupakan program lanjutan dari Program Keluarga Harapan yang sudah berjalan mulai dari tahun 2007. Selain itu gagasan pembentukan e-Warong Kube juga berawal dari pemberdayaan masyarakat yang telah terbentuk yaitu Kelompok Usaha Bersama atau sering didengar dengan . E-Warong Kube PKH, e-Warong ini merupakan warung sembako biasa namun dalam proses transaksinya yang berbeda yakni berupa non tunai atau elektronik yang sesuai dengan arahan presiden dengan memperluas keuangan inklusif.

Pemerintahan Pekanbaru saat ini sedang gencarnya menciptaan *Smart City Madani*, salah satu upaya yang dilakukan oleh Pemkot pekanbaru adalah dengan melaksanakan program E-Warong Kube. E-Warong Kube di Pekanbaru diresmikan pada tahun 2016 oleh Menteri Sosial Khofifah Indar Parawangsa di Jalan Rawa Bening RT 01 RW 02 Kelurahan Labuah Baru Barat Kecamatan Payung Sekaki Pekanbaru Riau. E-Warong Kube ini dilaksanakan di seluruh Kecamatan di Pekanbaru. Dapat dilihat pada tabel dibawah:

**TABEL 1.1**

**Daftar E-Warong Aktif Di Kota Pekanbaru**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **No** | **KECAMATAN** | **KELURAHAN** | **NAMA E WARONG** |
| 1 | Payung Sekaki | Labuh Baru Barat | Rawa Bening Harapan |
| 2 | Payung Sekaki | Tampan | Berkah Bersama |
| 3 | Senapelan | Padang Terubuk | Cahaya Dini |
| 4 | Tenayan Raya | Rejosari | Marwah Hangtuah |
| 5 | Tenayan Raya | Kulim | Serantau Madani |
| 6 | Tenayan Raya | Kulim | Sialang Rampai |
| 7 | Tenayan Raya | Tangkerang Timur | Harapan Sejahtera |
| 8 | Marpoyan Damai | Tangkerang Barat | Abidin Sejahtera |
| 9 | Marpoyan Damai | Maharatu | Berkah Harapan |
| 10 | Sukajadi | Pulau Karam | Mutiara Baroqah |
| 11 | Tampan | Sidomulyo Barat | Lancang Kuning Seahtera |
| 12 | Tampan | Delima | Rajawali |
| 13 | Tampan | Simpang Baru | Ketitiran |
| 14 | Rumbai Pesisir | Meranti Pandak | Kayu Aro |
| 15 | Rumbai Pesisir | Lembah Damai | Damai Sejahtera |
| 16 | Rumbai Pesisir | Limbungan | Pesisir Sejahtera |
| 17 | Sail | Suka Maju | Membawa Baroqah |
| 18 | Suka Jadi | Pulau Karam | Mutiara Berqah |
| 19 | Bukit Raya | Simpang Tiga | Mulia Sejahtera |
| 20 | Lima Puluh | Tanjung Rhu | Berkah Sejahtera |
| 21 | Pekanbaru Kota | Kota Baru | Kartini |
| 22 | Rumbai | Palas | Teratai |
| 23 | Rumbai | Sri Meranti | Rumbai Sejahtera |
| 24 | Rumbai | Rumbai Bukit | Hang Nadim Sejahtera |

Sumber: Data Dinas Sosial Kota Pekanbaru 2019

Data pendamping dan penerima PKH setiap kecamatan di Kota Pekanbaru selengkapnya dapat dilihat di tabel berikut ini:

**TABEL 1.2**

**Daftar Jumlah Pendamping dan KPM di Kota Pekanbaru**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **NO** | **KECAMATAN** | **PENDAMPING** | **PENERIMA PKH** |
| 1 | Bukit Raya | 4 | 694 Orang |
| 2 | Lima puluh | 2 | 525 Orang |
| 3 | Marpoyan Damai | 6 | 1.127 Orang |
| 4 | Paying Sekaki | 5 | 976 Orang |
| 5 | Pekanbaru Kota | 3 | 541 Orang |
| 6 | Rumbai | 8 | 1.652 Orang |
| 7 | Rimbai Pesisir | 7 | 1.324 Orang |
| 8 | Sail | 2 | 233 Orang |
| 9 | Senapelan | 4 | 666 Orang |
| 10 | Sukajadi | 4 | 624 Orang |
| 11 | Tampan | 9 | 1.765 Orang |
| 12 | Tenayan Raya | 11 | 2.341Orang |
|  | **Jumlah** | **65** | **12.468 Orang** |

Sumber: APD Kota Pekanbaru, 2020

Dari keterangan diatas dapat kita lihat bahwa dari 12 kecamatan yang ada di Pekanbaru sudah dilaksanakan program E-Waroeng Kube. Oleh karna itu peneliti tertarik meneliti bagaimana efektivitas e-warong pkh Berkah Harpan Kecamatan Marpoyan Damai dalam mengoptimalkan penyaluran bantuan, mengingat bahwa tujuan utama dari program ini adalah badan penyalur bantuan pangan non tunai. Dengan demikian peneliti akan membuat penelitian dengan judul “EFEKTIVITAS E-WARONG PKH BERKAH HARPAN KECAMATAN MARPOYAN DAMAI DALAM PENYALURAN BANTUAN PANGAN NON TUNAI (BPNT)” dengan rumusan masalah Bagaimana efektivitas e-warong PKH Berkah Harpan Kecamatan Marpoyan Damai dalam penyaluran bantuan pangan non tunai (BPNT) dan apa saja Hambatan yang didapati dalam proses e-warong PKH Berkah Harpan Kecamatan Marpoyan Damai dalam penyaluran bantuan pangan non tunai (BPNT).

**LANDASAN TEORI**

**EFEKTFITAS**

Ravianto (2010: 55) efektivitas adalah seberapa baik pekerjaan yang dilakukan, sejauh mana orang menghasilkan keluaran sesuai dengan yang diharapkan. Ini berarti bahwa apabila suatu pekerjaan dapat diselesaikan dengan perencanaan, baik dalam waktu, biaya maupun mutunya, maka dapat dikatakan efektif.

Penilaian terhadap tingkat kesesuaian program merupakan salah satu cara untuk mengukur efektivitas program. Efektivitas program dapat diketahui dengan membandingkan tujuan program dengan output program (Ditjen Binlantas Depnaker,1983, dalam Setiawan,1998)

Budiani dalam Efektivitas Program menyatakan bahwa untuk mengukur efektivitas suatu program dapat dilakukan dengan menggunakan variabel-variabel sebagai berikut :1). Ketepatan sasaran program Yaitu sejauhmana peserta program tepat dengan sasaran yang sudah ditentukan sebelumnya; 2). Sosialisasi program Yaitu kemampuan penyelenggara program dalam melakukan sosialisasi program sehingga informasi mengenai pelaksanaan program dapat tersampaikan kepada masyarakat pada umumnya dan sasaran peserta program pada khususnya.;3). Tujuan program Yaitu sejauhmana kesesuaian antara hasil pelaksanaan program dengan tujuan program yang telah ditetapkan sebelumnya; 4). Pemantuan program Yaitu sejauhmana pengawasan yang dilakukakan setelah dilaksanakannya program sebagai bentuk perhatian kepada peserta program.

**KONSEP KEBIJAKAN PUBLIK**

Dunn dalam Pasolong (2013:39) berpendapat bahwa kebijakan publik adalah suatu rangkaian pilihan-pilihan yang saling berhubungan yang dibuat oleh lembaga atau pejabat pemerintah pada bidang-bidang yang menyangkut tugas pemerintahan, seperti pertanahan keamanan, energi, kesehatan, pendidikan, kesejahteraan masyarakat, kriminalitas, perkotaan, dan lain-lain.

Pendapat lainnya menurut Anderson dalam Subarsono (2016:2), mendefinisikan kebijakan publik sebagai kebijakan yang ditetapkan oleh badan-badan dan aparat pemerintah. Walaupun disadari bahwa kebijakan publik dapat dipengaruhi oleh para aktor dan faktor dari luar pemerintah. Definisi lainnya menurut Dye dalam Subarsono (2016:2), kebijakan publik yaitu “apapun yang dipilih pemerintah untuk dilakukan atau tidak dilakukan *(public policy is whatever government choose to do or not to do)”.* Konsep tersebut sangat luas karena kebijakan publik mencakup sesuatu yang tidak dilakukan pemerintah di samping yang dilakukan pemerintah ketika menghadapi masalah publik.

Berdasarkan beberapa pendapat para ahli di atas, maka peneliti menyimpulkan bahwa kebijakan publik adalah serangkaian tindakan yang dilakukan atau tidak dilakukan oleh pemerintah yang berorientasi pada tujuan tertentu guna memecahkan masalah-masalah publik atau demi kepentingan publik.

## Proses Kebijakan Publik

Dalam menyelesaikan masalah yang terjadi di masyarakat, perlu dilakukan sebuah analisis kebijakan, yang bagi William N. Dunn adalah untuk merumuskan masalah sebagai bagian dari pencarian solusi atau alternatif kebijakan.Ada beberapa tahapan proses pembuatan kebijakan, yang ditawarkan oleh William N. Dunn, yaitu penyusunan agenda kebijakan, formulasi kebijakan, adopsi kebijakan, implementasi kebijakan dan evaluasi kebijakan.

1. Tahap Penyusunan Agenda (*Agenda Setting*)

Pada tahap ini, hal yang perlu dilakukan pertama kali adalah menentukan masalah publik yang akan dipecahkan.Tidak semua masalah akan menjadi masalah publik, tidak semua masalah menjadi isu, serta tidak semua isu menjadi agenda pemerintah.Suatu masalah akan menjadi masalah publik bila ada seseorang atau kelompok yang menggerakan ke arah tindakan tersebut.Pendapat lain juga dikatakan oleh Woll yang dikutip oleh Hessel, bahwa suatu isu kebijakan dapat berkembang menjadi agenda kebijakan apabila memiliki dampak yang besar bagi kepentingan banyak orang.

William N. Dunn menawarkan 4 fase proses *problem structuring* untuk merumuskan masalah, yaitu *problem search* (pencarian masalah), *problem definition* (pendefinisian masalah), *problem specification* (spesifikasi masalah) dan *problem setting* (pengenalan masalah).

Setelah menentukan masalah-masalah yang akan dipecahkan, para pejabat yang dipilih, menempatkan masalah publik tersebut pada agenda kebijakan. Pada tahap ini, banyak masalah tidak disentuh sama sekali dan ada juga masalah yang ditunda untuk waktu yang lama.

1. Tahap Formulasi Kebijakan (*Policy Formulation*)

Pada tahap ini, masalah yang sudah masuk dalam agenda kebijakan kemudian dibahas oleh para pembuat kebijakan.Para pejabat merumuskan alternatif kebijakan yang terbaik untuk mengatasi masalah tersebut. Dalam merusmuskan alternatif kebijakan, perlu dilakukan prosedur *forecasting* (peramalan) untuk mengetahui konsekuensi kebijakan yang dipilih di masa mendatang.

1. Tahap Adopsi Kebijakan (*Policy Adoption*)

Pada tahap ini, untuk menentukan alternatif kebijakan yang dipilih melalui dukungan dari mayoritas legislatif, konsensus diantara direktur lembaga atau keputusan peradilan.

1. Tahap Implementasi Kebijakan (*Policy Implementation*)

Tahap ini merupakan tahap pelaksanaan kebijakan yang telah dibuat. Menurut Dunn, implementasi adalah kebijakan yang telah dilaksanakan oleh unit-unit administrasi dengan memobilisasikan sumber daya finansial dan manusia.Tahap ini merupakan tahap yang penting dalam proses kebijakan publik. Bagi Patton dan Sawicki, Implementasi berkaitan dengan beragam kegiatan untuk merealisasikan program. Para eksekutif mengatur cara untuk menerapkan kebijakan yang telah ditentukan.

1. Tahap Evaluasi Kebijakan (*Policy Assesment*)

Tahap ini merupakan tahap akhir dari proses kebijakan. Tahap ini dilakukan untuk menilai terhadap kebijakan yang sudah dilaksanakan. Seperti yang dikatan oleh Dunn, evaluasi dilakukan bukan hanya untuk mendapatkan kesimpulan dari kebijakan yang sudah dilaksanakan, melainkan juga saran dan kritik untuk merumuskan kembali masalah tersebut.

**KONSEP PKH (Program Keluarga Harapan)**

Salah satu kebijakan sosial yang dikembangkan oleh pemerintah adalah Program Keluarga Harapan (PKH). Menurut Kementerian Sosial RI Program Keluarga Harapan adalah program pemberian bantuan sosial bersyarat kepada keluarga dan/atau seseorang miskin dan rentan yang terdaftar dalam data terpadu program penanganan fakir miskin, diolah oleh Pusat Data dan Informasi Kesejahteraan Sosial dan ditetapkan sebagai Keluarga Penerima Manfaat PKH.

Didalam Permensos RI No 1 tahun 2018 tentang Program Keluarga Harapan bahwa Keluarga Penerima Manfaat (KPM) adalah keluarga penerima bantuan sosial PKH yang telah memenuhi syarat dan ditetapkan dalam keputusan. Bantuan Sosial PKH adalah bantuan berupa uang kepada keluarga dan/atau seseorang miskin, tidak mampu dan/atau rentan terhadap resiko sosial.

**Tujuan dari Program Keluarga Harapan adalah** :

1. Untuk meningkatkan taraf hidup Keluarga Penerima Manfaat melalui akses layanan pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan sosial.
2. Mengurangi beban pengeluaran dan meningkatkan pendapatan keluarga miskin dan rentan.
3. Menciptakan perubahan perilaku dan kemandirian Keluarga Penerima Manfaat dalam mengakses layanan kesehatan dan pendidikan serta kesejahteraan sosial.
4. Mengurangi kemiskinan dan kesenjangan.
5. Mengenalkan manfaat produk dan jasa keuangan formal kepada Keluarga Penerima Manfaat.

Komponen-komponen Program Keluarga Harapan yang terdapat didalam Permensos RI No 1 tahun 2018 tentang Program Keluarga Harapan

**KONSEP BANTUAN PANGAN NON TUNAI**

Salah satu program yang dibentuk oleh pemerintah untuk mengurangi beban masyarakat dalam pemenuhan kebutuhan pokok adalah Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT). Program bantuan pangan non tunai (BPNT) adalah bantuan pangan yang disalurkan secara non tunai dari pemerintah kepada keluarga penerima manfaat (KPM) setiap bulannya sebesar Rp.110.000/KPM, melalui mekanisme akun elektronik berupa kartu keluarga sejahtera (KKS) yang digunakan hanya untuk membeli kebutuhan bahan pangan di tempat yang telah bekerjasama dengan bank himpunan bank Negara (Himbara) yang kemudian disebut ewarong. Program ini diselanggrakan sesuai dengan PERPRES RI No.63 Tahun 2017 tentang Penyaluran Bantuan Sosial Secara Non Tunai. Salah satu tujuan program bantuan pangan non tunai (BPNT) adalah untuk mengurangi beban pengeluaran kebutuhan pangan masyarakat serta memberikan nutrisi seimbang kepada keluarga penerima manfaat (KPM) secara tepat sasaran dan tepat waktu.

Tujuan Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) adalah sebagai berikut:

* 1. Mengurangi beban pengeluaran keluarga penerima manfaat (KPM) melalui pemenuhan sebagian kebutuhanpangan.
  2. Memberikan nutrisi yang lebih seimbang kepada KPM.
  3. Meningkatkan ketepatan sasaran dan waktu penerimaan bantuan pangan bagi keluarga penerima manfaat (KPM).

Manfaat Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) adalah berikut:

1. Meningkatnya ketahanan pangan di tingkat keluarga penerima manfaat (KPM) sekaligus sebagai mekanisme perlindungan sosial dan penanggulangan kemiskinan
2. Meningkatnya efisiensi penyaluran bantuan sosial.

**KONSEP E WARONG PKH**

E-Warong Kube-PKH merupakan program yang diluncurkan oleh Kementerian Sosial (Kemensos) sejak Juni 2016. Program ini sebagai respon Kemensos terhadap arahan yang diberikan Presiden Joko Widodo pada April 2016 kepada jajaran menterinya. Isi arahan tersebut diantaranya: *1) pentingnya mewujudkan sistem finansial nasional yang inklusif; 2) penyaluran semua bantuan sosial dan subsidi secara nontunai dengan menggunakan sistem perbankan untuk memudahkan kontrol dan pemantauan, serta mengurangi penyimpangan; dan 3) perlunya mengintegrasikan penggunaan beragam kartu dalam menyalurkan dana bansos menjadi satu kartu*.

Terkait hal ini, Menteri Sosial memberikan arahan pada jajaran di lingkup Kemensos bahwa 1) semua program penanganan kemiskinan perlu disinergikan agar outcome (keluaran)-nya memberikan dampak luas, efisien, dan efektif; 2) perlu dilakukan pemberdayaan pendamping PKH dan masyarakat yang menjadi dampingannya, dan menjadikan mereka sebagai pelaku dalam sistem keuangan inklusif; dan 3) proses penanganan Kelompok Usaha Bersama (Kube) harus holistik, mulai dari pembentukan, pengorganisasian, sampai pada pemasaran hasil usahanya.

Program e-Warong Kube-PKH termasuk ke dalam kebijakan sosial yang dikeluarkan Pemerintah melalui Permensos Nomor 25 Tahun 2016 tentang Bantuan Pengembangan Sarana Usaha Melalui Elektronik Warung Gotong Royong Kelompok Usaha Bersama Program Keluarga Harapan. Kebijakan Sosial menurut Bessant, Watts, Dalton, dan Smith, seperti dikutip oleh Suharto (2011), menunjuk pada apa yang dilakukan oleh Pemerintah sebagai upaya untuk meningkatkan kualitas hidup manusia melalui pemberian beragam tunjangan pendapatan, pelayanan kemasyarakatan, dan perogram-program tunjangan sosial lainnya. Sebagai sebuah kebijakan publik, kebijakan sosial memiliki fungsi pencegahan (preventif), penyembuhan (kuratif), dan pengembangan (developmental). Kebijakan sosial adalah ketetapan yang didesain secara kolektif untuk mencegah terjadinya masalah sosial (fungsi preventif), mengatasi masalah sosial (fungsi kuratif), dan mempromosikan kesejahteraan (fungsi developmental) sebagai wujud kewajiban negara (state obligation) dalam memenuhi hak-hak sosial warganya. Dalam hal ini, kebijakan sosial dikeluarkan sebagai respon dari kemiskinan yang ada demi tercapainya kesejahteraan sosial.

**METODE PENELITIAN**

Jenis penelitian ini adalah kualitatif dengan analis deskriftif. Penelitian ini menggali fakta mengenai efektivitas e-warong PKH Berkah Harpan Kecamatan Marpoyan Damai dalam penyaluran bantuan pangan non tunai (BPNT), dideskripsikan berdasarkan temuan yang diperoleh melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi.

Subjek penelitian atau seseorang yang memberikan informasi terkait judul penelitian adalah efektivitas e-warong PKH Berkah Harpan Kecamatan Marpoyan Damai dalam penyaluran bantuan pangan non tunai (BPNT), seseorang yang memberikan informasi tersebut disebut pula informan. Informan adalah orang yang diharapkan dapat memberikan informasi tentang situasi dan kondisi pada latar belakang. Adapun penentuan subjek penelitian memakai teknik purpusive sampling dengan teknik penentuan informan memakai key informan, key informan adalah : Pendamping PKH, Petugas Ewaroeng PKH Berkah Harapandan Masyarakat Penerima Manfaat

**PEMBAHASAN**

**Efektivitas e-warong PKH Berkah Harpan Kecamatan Marpoyan Damai dalam penyaluran bantuan** **pangan non tunai (BPNT)**

* + - * 1. **Kelompok Sasaran**

Pada dasarnya, sasaran program BPNT (Bantuan Pangan Non-Tunai) adalah Keluarga Penerima Manfaat Bantuan Pangan Non Tunai adalah keluarga, yang selanjutnya disebut Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Bantuan Pangan Non Tunai. KPM adalah penduduk dengan kondisi sosial ekonomi 25% terendah di daerah pelaksanaan. Besaran Bantuan Pagan Non Tunai adalah Rp. 110.000,-/KPM/bulan. Bantuan tersebut tidak dapat diambil tunai dan hanya dapat ditukarkan dengan beras dan atau telur di E-Warong (Elektronik Warung Gotong Royong) & RPK (Rumah Pangan Kita) KPM ini tidak merangkap angota PKH tetapi anggota PKH otomatis mendapat bantuan BPNT. hal ini disampaikan oleh ibu Nurul selaku ketua e-Warong PKH Berkah Harapan pada saat wawancara tanggal 5 Mei 2021

“*KPM adalah warga kecamatan marpoyan damai, kalau untuk kategori atau karakteristik penerima pihak e-Warung tidak tahu prosesnya semua data dihandle oleh pusat, kami hanya menyalurkan bantuan”*

Tetapi karena data yang handle pusat yaitu kementrian sosial jadi pelaksanaan nya banyak menjumpai masalah mulai dari doble data, ada keluarga yang mampu masih menerima bantuan ada juga masyarakat yang tidak mampu tetapi tidak menerima bantuan hal ini terjadi karena pemerintah terahir survey data tahun 2011. Kemudian ketika terjadi masalah masyarakat tidak tau harus mengurus kemana seperti yang disampaikan ibu nurul selaku ketua e-Warong PKH Berkah Harapan pada saat wawancara tanggal 5 Mei 2021

“*banyak juga masyarakat disini yang kurang mampu tidak terdaftar menjadi KPM atau mendapatkan bantuan BPNT dan ada juga yang sudah mampu tetapi masih terdaftar sebagai penerima bantuan, hal ini terjadi karna pemerintah masih memakai data lama, dan terakhir survey pada tahun 2011”*

Selain karena data terakhir adalah tahun 2011 ada juga penerima bantuan yang tidak mendapatkan bantuan Karen adanya doble data, kemudian ada yang pindah tetaip tidak diberi tahu seperti yang diungkapkan oleh ibu nurul selaku ketua e-Warong PKH Berkah Harapan pada saat wawancara tanggal 5 Mei 2021

“ *saya sebagai ketua e-Warong PKH Berkah Harapan saja tidak mendapatkan bantuan, setelah ditanya ternyata karena double data, jadi karna ada dua kartu yang disebut kartu komplementer maka orang bank tidak bisa mensingkronkan data, akhirnya saya sendir tidak mendapatkan bantuan, jadi panerima bantuan social ini, disaat mendapat bantuan PKH tidak mendapatkan lagi BPNT begitu juga sebaliknya, namun ada juga yang tidak mengetahu info tersebut karena tidak mempunyai hp android”*

* + - * 1. **Sosialisasi program**

Sosialisasi dan komunikasi mempunyai peranan yang sangat penting dalam penyampaian suatu kebijakan, oleh karena itu kebijakan yang akan disampaikan harus dipahami dengan baik oleh pelaksananya. Dengan demikian kebijakan tersebut dapat dikomunikasikan dan disebarkan dengan jelas, akurat dan konsisten serta tidak menimbulkan kontradiksi. Berdasarkan Pedoman Umum BPNT Tahun 2018 bahwa sosialisasi dan komunikasi Program BPNT dirancang untuk terjadinya proses komunikasi, aliran informasi, dan pembelajaran pada berbagai pelaksana di pusat dan daerah, kalangan media, LSM, akademisi dan masyarakat, termasuk Peserta/KPM BPN terutama di daerah yang sedang menjalankan Program BPNT. Tersosialisasikannya BPNT kepada semua pihak, baik yang terkait langsung maupun tidak langsung, merupakan kunci kesuksesan BPNT. Untuk itu disusun strategi komunikasi dan sosialisasi BPNT yang komprehensif. Strategi komunikasi dan sosialisasi ini tidak hanya memfokuskan pada aspek implementasi dan keberhasilan pelaksanaan program BPNT, tetapi juga aspek pengembangan kebijakan, khususnya dalam membangunan dukungan dan komitmen untuk melembagakan Pogram BPNT dalam bentuk Sistem Jaminan Sosial.

Sosialisasi selama penyaluran BPNT di e-Warong Berkah harapan belum pernah mendapatkan sosialisasi, hal ini dungkapkan oleh ibu nurul selaku ketua e-Warong PKH Berkah Harapan pada saat wawancara tanggal 5 Mei 2021

“ *selama ini tidak ada sosialisasi terhadap kami penyedia (jasa KUBE) harusnya kami diajarkan bagaiaman manajemnt pengaturan keuangan menghitung untung dan rugi dan lain-lain, dan laporan keungan ini sangat penting karena kmi harus melaporkan laporan keuangan setiap pencairannya. selama ini kami berlima ketua, sekretaris, bendahara dan anggota 3 otodidak belajar sendiri, tapi dulu ada penyelia kami tetapi sudah berhenti, bapak tersebut memantau perkembangan KUBE kami mengajarkan cara-cara manajemen keungan dll Alhamdulillah dari situ kami banyak belajar, tetapi setelah beliau berhenti kami tidak mempunyai penyelia lagi”*

Untuk penyampaian pencairan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) itu dilakukan pada saat tanggal sekian ketika saldo sudah masuk di rekening KPM, penyampaian ini mulai dari Bank Penyalur kepada Dinas Sosial, kemudian Dinas Sosial Menyampaikan kepada TKSK, kemudian TKSK memberiatukan ke grup WA dan juga SMS/WA ke no masing-masing KPM. hal ini dungkapkan oleh ibu nurul selaku ketua e-Warong PKH Berkah Harapan pada saat wawancara tanggal 5 Mei 2021

“*Nanti pada saat tanggal sekian ketika saldonya sudah masuk di Kartu KKS nya, di Kartu ATM nya itu, maka diinformasikan kepada seluruh KPM untuk datang di Agen yang telah ditentukan. Dan penyampainnya itu pertama memang menyurat ya, pihak BRI menyurat ke TIKOR Kata dalam hal ini adalah Dinas Sosial, Dinas Sosial menyampaikan kepada teman-teman TKSK kemudian ke Agen. Biasanya Agen juga lebih cepat karena Agen punya mesin EDC. Justru Agen juga sekarang biasa heran karena masyarakat lebih cepat tau, ohh sudah ada saldo yang masuk. Mereka juga kalaupun hari ini rekeningnya sudah masuk saldonya itu hari juga kalau dia mau gesek atau belanja di e-Warong ya itu bisa dia belanjakan*

* + - * 1. Tujuan program

Dengan adanya program BPNT masyarakat yang kurang mampu semakin terbantu akan pemenuhan kebutuhan setiap harinya, beban ekonomi mampu diminimalisir, masyarakat juga dapat memilih kebutuhannya sendiri di e-warong sesuai dengan besaran saldo yang diterima, pemilihan kebutuhan di e-warong juga bervariasi seperti karbohidrat (Beras), protein (Tempe, daging ayam/ 126 daging sapi), dan vitamin (sayur-sayuran). Seperti yang diungkapkan oleh ibu nurul selaku ketua e-Warong PKH Berkah Harapan pada saat wawancara tanggal 5 Mei 2021

“e*-warong kami menyediakan empat sehat keculi susu hal ini dimaksudkan oleh pemerintah supaya bisa membantu bbelanjakebutuhan masyarakat sehari-harinya. Tetapi kami tidak selalu menyediakan ayam atau daging., karena daging dan ayam tersebut tidak tahan lama kami hanya menyediakan sesuai permintaan dari masyarakat, yang lebih banyak kami stok kacang kacangan karna cukup tahan lama”*

Dan ketika penyaluran melalu e-warong Mampu meningkatkan program GNNT (Gerakan Nasional Non Tunai) dimana masyarakat mulai belajar dan memahami bertransaksi secara non tunai. Dengan begitu dua tujuan program pemerintahan tercapai yaitu membantu masyarakat memenuhu kebutuhan pangan dan juga mempercepat pelaksanaan smart city dengan memanfaatkan IT dalam kegiatan peyanan publik.

* + - * 1. Pemantauan program

Komitmen pemerintah Kota Pekanbaru dalam melaksanakan Program BPNT melalui e-Warong Kube-PKH sudah terlihat konsten dalam hal penyaluran bantuan dan juga evaluasi dan system pengawasannya. Tetapi belum terlihat maksimal komitmen Bulog untuk menyediakan beras yang layak juga masih kurang, sehingga menyebabkan Bulog tidak lagi dipercaya sebagai distributor beras untuk e-Warong Kube-PKH di Kota Pekanbaru khususnya e-Warong Berkah Harapan sehingga yang awalnya kerjasama dengan bulog dihentikan. Hal ini diungkapkan oleh ibu nurul selaku ketua e-Warong PKH Berkah Harapan pada saat wawancara tanggal 5 Mei 2021:

“ *untuk pengawasan pihak dinastiba tiba dating tanpa memberitahuan terlebih dahulu sehingga kami harus benar-benar tidak bisa lalai mulai dari kondisi e-Warong dan yang paling penting adalah laporan, tetapi konsisten penyeda bahan yaitu bulog tdak menyediakan beras yang bagus sehingga masyarakat complain dan tdak mengambil beras tetapi yang lain haslnya adanya penumpukan beras di e-Warong”*

**Kendala dan solusi dalam proses Pelaksanaan Penyaluran Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) Melalui E-Warong PKH Berkah Harapan Kecamatan Marpoyan**

Dalam pelaksanaannya di Kota Pekanbaru, penyaluran program BPNT melalui e-Warong Kube-PKH tidak luput dari berbagai kendala yang menyebabkan implementasinya jadi kurang maksimal dan tidak tepat sasaran. Adapun berbagai kendala tersebut ialah: (diungkapkan oleh ibu nurul selaku ketua e-Warong PKH Berkah Harapan pada saat wawancara tanggal 5 Mei 2021)

“*kemdala yang kami hadapi disini dalam proses pelaksanaan adalah Kurangnya informasi dari Pemerintah Pusat di awal pelaksanaan program jadi kami disuruh baca sendiri peratura dan juknis sehingga ketika terjadi kesalahan kami kurang bisa menjelaskan kepada KPM, apalagi ada yang tidak masuk dana ke reknin KPM karena Adanya double data warga miskin (perbedaan data antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah) dan juga doble kartu. Sementara Sumber daya manusia (kurangnya kualitas dan kuantitas pendamping sosial)”*

“*Masalah tepat sasaran juga masih belum karena adanya data yang tidak tepat (masyarakat yang sudah mampu masih terdaftar sebagai warga miskin), lalu msalah sarana dan prasarana Sarana dan prasarana yang masih kurang dapt dilihat dari tempat e-warong kami ini juga karena Anggaran yang kurang maksimal dan terbata*s kemudian untuk masalah Kendala teknis (saldo kosong, *Pin lupa, Kartu hilang, dll);*

Kemudian untuk solusi yang peneliti dapati dari hasil wawancara

“*pihak kecamatan menginginkan adanya kesesuaian data antara pusat dan daerah dan juga dilalukan survey data untuk menghindari masalah-masalah bantuan yang tidak tepa sasaran dan juga agar adanya persamaan persepsi antara pusat dan daerah*”

“*dari pihak e-warong sendri berharap mereka diberikan peltihan dan juga pedamping yang mengarahkan dan membantu kemudian juga mereka berharap diberi kegiatan di hari lain, selain hari pencairan supaya e-warong tetap ada kegatan dihari biasa”*

**KESIMPULAN**

Efektivitas e-warong PKH Berkah Harpan Kecamatan Marpoyan Damai dalam penyaluran bantuan pangan non tunai (BPNT) masih kurang efektif karena kelompok sasaran masih belum tepat karena data yang dipakai masih data tahun 2011 dan juga penyebab lain nya data antara pusat dan daerah berbeda. Selain itu doble data antara PKH dan BNPT menyebakan saldo KPM kosong. Kemudian malah sosialisi masih sangat kurang sekali mulai dari sosialisasi kepada pengelola e-warong dan juga masyarakat. Tetapi untk tujuan program masyarakat sudah merasakan manfaatnya karena KPM sangat terbantu dalam memenuhi kebutuhan makan sehari-hari dan juga sejalan dengan itu juga tujuan smart city madani tercapai yaitu pemanfaatan IT dalam pelaksanaan pelayanan publik. Untuk pemantauan program disini sudah terlihat komitmen pemeritah dan pemerintah (yang bertanggung jawab) sudah melaksanakan evaluasi lusin dengan turun ke lapangan jemput bola ke e-warong dengan pemerikasaan yang tba-tiba.

Untuk Faktor penghambat kegiatan program Bantuan Pangan Non Tunai e-warong PKH Berkah Harpan Kecamatan Marpoyan Damai antara lain adanya saldo Keluarga Penerima Manfaat yang 0 saat pengecekan pada mesin edc, sehingga kpm tidak bisa menukarkan bantuan, , adaya doble data antara PKH dan BPNT, adanya kartu KKS yang hilang sehingga kpm tidak dapat menukarkan kebutuhan dan pengurusan kehilangan kartu KKS yang dirasa berbelit belit dan membutuhkan waktu yang cukup lama untuk mengganti kehilangan kartu KKS tersebut.

**DAFTAR PERPUSTAKAAN**

Abdul Wahab, Solichin. 2004. Analisis Kebijaksanaan dari Formulasi keImplementasi Kebijaksanaan Negara. Jakarta: Bumi Aksara.

Abidin, Said Zainal. 2008. Strategi Kebijakan dalam Pembangunan dan Ekonomi Politik. Jakarta: Suara Bebas

Budi Winarno, 2002.Kebijakan Publik; Teori dan Proses.Media Presindo Yogyakarta

Departemen Agama RI, Al-Qur‟an dan Tafsir, Jilid X (Jakarta: Surat Menteri Agama Republik Indonesia, 1991

Edward, George. C. 1980. Implementing Public Policy. Washington D.C: Congresional Quarterly Inc

Indiahono, Dwiyanto. (2009). Kebijakan Publik Berbasis Dynamic Policy Analysis. Yogyakarta: Gava Media

Lexy J, Moleong. (1997). Metode Penelitian Kualitatif. Jakarta: PT. Remaja Rosdakarya

Khadin al Haramain asy Syarifain (Pelayan kedua Tanah Suci) Fahd ibn „Abd al Aziz Al Sa‟ud, Raja Kerajaan Saudi Arabia, Al Qur‟an dan Terjemahnya, (Saudi Arabia: Kerajaan Saudi Arabia, 1424 H)

Moleong, Lexy J. (2007) Metodologi Penelitian Kualitatif, Penerbit PT Remaja Rosdakarya Offset, Bandung

Muhammad Tahir Azhary, Beberapa Aspek Hukum Tata Negara Hukum Pidana dan Hukum Islam, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2015)

Nugroho, Riant. (2011). Public Policy: Dinamika Kebijakan-Analisis Kebijakan-Manajemen Kebijakan. Jakarta: Elex Media Komputindo

Petunjuk Pelaksanaan e-Warong KUBE Berdasarkan Peraturan Menteri Sosial RI Nomor 25 Tahun 2016 Tentang Bantuan Pengembangan Sarana Usaha Melalui Elektronik Warung Gotong Royong Kelompok Usaha Bersama Program Keluarga Harapan. Kementerian Sosial Republik Indonesia

Sugiyono. 2007. Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D. Bandung: Alfabeta.

Subarsono, A.G. (2012). Analisis Kebijakan Publik: Konsep, Teori dan Aplikasi. Yogyakarta: Pustaka Pelajar

Tangkilisan, Hessel Nogi S. 2003.Kebijakan Publik Untuk Pemimpin Berwawasan Internasional. Blairung & Co, Yogyakarta.

Tim Pengendali BPNT, Pedoman Umum Bantuan Pangan Non Tunai (Jakarta: t.p., 2017)

William N. Dunn, 2003. Pengantar Analisis Kebijakan Publik, Gadjah Mada University Press: Yogyakarta. Terjemahan, Tangkilisan, 2003: 1)

**Perundang-Undangan Dan Peraturan Pemerintah:**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Peraturan Mentri Sosial RI No 1 tahun 2018 tentang Program Keluarga Harapan

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2009 Tentang Kesejahteraan Sosial.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 Tentang Penanganan Fakir Miskin.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial.

Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2016 Tentang Bantuan Pengembangan Sarana Usaha Melalui Elektronik Warung Gotong Royong Kelompok Usaha Bersama Program Keluarga Harapan.

Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Sosial Nomor 25 Tahun 2016 Tentang Bantuan Pengembangan Sarana Usaha Melalui Elektronik Warung Gotong Royong Kelompok Usaha Bersama Program Keluarga Harapan.

Peraturan Presiden RI No.63 Tahun 2017 tentang Penyaluran Bantuan Sosial Secara Non Tunai